

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)

E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)

Indrajit, Richardus Eko, Membangun Aplikasi E-Government, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002)

Lukman, Sampara, Manajemen Kualitas Pelayanan, (Jakarta: STIA LAN Press, 2000)

Modul Materi Good Governance dan Pelayanan Publik, (Jakarta, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016)

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Phillipus M. Hadjon, (Surabaya: Yuridika, 1993)

Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, A. S, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung: NUANSA, 2009)

Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui

- Restrukturasi dan Pemberdayaan, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003)
- Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004)
- SF, Marbun dan Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Silalahi, Ulber dan Wirman Syarfi, Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel, Cetakan Pertama, (Sumedang: IPDN Press, 2015),
- SJ Sumarto, Hetifah, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia: UI Press, 2007)
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 29.
- Sutedi, Adrian, Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Ed.1, Cet.3, (Depok: Rajawali Pers, 2020)

Wignjosoebroto, Soetandyo, HUKUM: Konsep dan Metode, (Malang: Setara Press, 2013)

B. JURNAL

Adianto, Mayarni dan Dadang Mashur, Penerapan *Good Governance* dalam Pelayanan Perizinan di Kota Dumai, *Journal.uir.ac.id*, Vol. III, No. 2, Oktober 2017.

Ahmad, Jamaluddin, Perjalanan *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), *New Public Service* (NPS) Menuju Manajemen Publik Kelas Dunia, PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, Oktober 2012

Assegaf MIF, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah, Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 2, 2019

Dewi, Dyah Adriantini Sintha, Optimalisasi Pelayanan Publik di Bidang Perizinan, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 1, Januari 2016

Herawati, N, Penerapan *E-Government* Dalam Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Studi Penelitian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah), *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 13, Nomor 2, Februari 2016

Juliani, Henny, Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 1,

Edisi Khusus 1, 2018

Lumbanraja Doramia, Anggita, Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020

Mariano, Sabino, Penerapan E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo, repository.unair.ac.id, tesis, 2018

Nuriyanto, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, 2014

Prasetyo DW, Mochammad Mustam, Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, Journal Of Public Policy And Management Review, Vol. 7, No. 3, 2018

Ristiani, Ida Yunari, Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. XI, No. 2, Juli 2020

Ronnyta, Vania Regita, Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui SI-IMUT Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Journal of Politic and Government Studies, (Volume 9, Nomor 03, Tahun 2020)

Santoso, Eko Budi, Manajemen Pelayanan Air Siap Minum Melalui Program Zona

Air Minum Prima (ZAMP) Sebagai Wujud Smart City Kota Malang,
eprints.umm.ac.id, Maret 2019

Solechan, Edgar Wilardi, Harmonisasi Kewenangan Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2, Issue 1, Maret 2019

Suhartoyo, Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Administrative Law & Governance Journal, Volume 2, Issue 1, Maret 2019

Susanto, Sri Nur Hari, Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2, Issue 2, 2019

Tamimi, Zindar, Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Tim Emergency Service Kabupaten Bantaeng, Politika: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 6, No. 1, Desember 2015

Wibawa, Kadek Cahya Susila, Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2, Issue 2, 2019

Wibaya, Herry, Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara dan Pemerintahan (Studi perbandingan dengan Pengawasan PERATUN), eprints.undip.ac.id, tesis, 2010

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan *e-Government*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

D. INTERNET

Kbbi.web.id, diakses pada 28 September 2020

<https://izin.semarangkota.go.id/>, diakses pada 1 Oktober 2020

<https://izin.semarangkota.go.id/siimut/>, diakses pada 1 Oktober 2020

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/sinakes-online-kota-semarang>, diakses pada 25 Desember 2020

<https://jateng.tribunnews.com/2018/07/12/dpmptsp-kota-semarang-menjadi-yang-terbaikdalam-investment-award-2018>, diakses pada 25 Desember 2020

E. WAWANCARA

Adi Wisesa Putra, *Wawancara*, Masyarakat Pemohon Izin, 10 Desember 2020

Agil Pamungkas, *Wawancara*, Masyarakat Pemohon Izin, 14 Desember 2020

Moch. Yusuf Syarif, *Wawancara*, Masyarakat Pemohon Izin, 8 Desember 2020

Pramastuti Moegiyono, S.IP., *Wawancara*, Kepala Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan DPMPTSP Kota Semarang, 7 Desember 2020

Retno Novianti, *Wawancara*, Masyarakat Pemohon Izin, 7 Desember 2020

Silviana Ratnasari Widodo, *Wawancara*, Masyarakat Pemohon Izin, 14 Desember 2020

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3548691, 3584504, 3513366 Psw. 1318, 1464, 1534 Semarang - 50132

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/729/x/11/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal – Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dengan ini menerangkan :

Nama : Aliyah Yustika Aqmarani
Pekerjaan/Jurusan : Mahasiswa / S-1 Hukum
NIM : 11000117120098
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Penanaman Modal – Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tanggal 7 Desember 2020 dengan judul penelitian “Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu (SI IMUT) Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Ideal Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang”. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang


SOENARTO, S. Hum, MM

